

PENILAIAN KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Ahmad Baehaqi

Akuntansi Pemerintah, STIE Putra Bangsa

Email: baehaqia35@gmail.com

ABSTRACT

Sebelum era reformasi daerah belum diberi kewenangan dalam mengurus keuangannya sendiri, dengan adanya otonomi daerah kini daerah sudah memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Periode pengamatan selama 2016-2017. Objek yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan PMK 266/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel satu (PAD/realisasi total pendapatan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Variabel dua (realisasi pajak+retribusi daerah/realisasi total pendapatan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Variabel tiga (realisasi ruang fiskal/realisasi pendapatan APBD) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Variabel empat (realisasi pajak+retribusi daerah/realisasi PDRB non Migas) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Variabel lima (realisasi total pendapatan+realisasi penerimaan pembiayaan/realisasi belanja+realisasi pengeluaran pembiayaan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Variabel enam (realisasi belanja modal/realisasi total belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/ kota. Variabel tujuh (realisasi belanja pegawai/realisasi total belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/kota. Variabel delapan (realisasi SiLPA/realisasi total belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/kota. Variabel Sembilan (defisit APBD/total pendapatan APBD) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/kota. Variabel sepuluh (realisasi pendapatan/realisasi target pendapatan) dengan nilai terbaik sebanyak 8 kabupaten/kota. Variabel sebelas (realisasi belanja/pagu belanja) dengan nilai terbaik sebanyak 9 kabupaten/ kota. Nilai terbaik kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yaitu diraih oleh Kota Semarang dengan nilai akhir 38.

Kata Kunci: Kinerja Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, PMK 266/2015, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada era reformasi, menuntut negara Indonesia untuk mampu kehidupan negaranya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi. Menurut Whenny (2011: 2-3) memasuki era reformasi pada pertengahan tahun 1998, timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terutama tingkat kabupaten dan kota.

Menurut Mutiha (2016: 106) salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepala daerah diserahkan urusan, tugas, dan wewenang untuk mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Iqbal (2012: 23) pemerintah daerah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Menurut Iqbal *et al* (2017: 2-3) penilaian kinerja kesehatan fiskal keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan terpercaya juga semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di

PENILAIAN KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

provinsi Jawa Tengah tahun 2017? Bagaimana nilai terbaik kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015. Untuk mengetahui nilai terbaik kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

Manfaat Penelitian

Hasil pemeringkatanb kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih bermanfaat bagi pengguna informasi baik pemerintah daerah itu sendiri dalam mengevaluasi kinerja aparatnya, pihak legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pemerintah, maupun masyarakat secara umum dalam menilai akuntabilitas pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sari (2014) desentralisasi fiskal merupakan alat atau instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan partisipatif. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer dalam struktur organisasi.

Menurut Albasiah (2013) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Bird (2014) dalam Iqbal (2017) mendefinisikan kesehatan fiskal sebagai kemampuan struktur fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan dan goncangan masa depan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan dan dokumen-dokumen yang berada di perusahaan atau di lembaga, buku-buku kepustakaan, literatur, dan sumber lain.

Jenis Data

Menurut Yusuf (2014) dalam Muthi (2016) penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk diskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.

Metode Pengumpulan Data

Memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penelitian, penulis melakukan berbagai cara agar data

atau informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka. Metode dokumentasi atau studi pustaka adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website resmi www.djpk.depkeu.go.id yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Formulasi perhitungan nilai kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PMK 266/2015 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio tahun t dan tahun t-1 pada masing-masing variabel.

a. Variabel Satu

$$V1 = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

b. Variabel Dua

$$V2 = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah+Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

c. Variabel Tiga

$$V3 = \frac{\text{Realisasi Ruang Fiskal}}{\text{Realisasi Pendapatan APBD}}$$

d. Variabel Empat

$$V4 = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah+Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PDRB non Migas}}$$

e. Variabel Lima

$$V5 = \frac{\text{Real. Total Pend Daerah+Real. Penerimaan Pembiayaan}}{\text{Real. Total Bli Daerah+Real.Total Pengeluaran Pembiayaan}}$$

f. Variabel Enam

$$V6 = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Realisasi total belanja APBD}}$$

g. Variabel Tujuh

$$V7 = \frac{\text{Realisasi belanja pegawai}}{\text{Realisasi total belanja APBD}}$$

h. Variabel Delapan

$$V8 = \frac{\text{Realisasi SiLPA tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi total belanja APBD}}$$

i. Variabel Sembilan

$$V9 = \frac{\text{Defisit APBD}}{\text{Total pendapatan APBD}}$$

j. Variabel Sepuluh

$$V10 = \frac{\text{Realisasi Pendapatan APBD}}{\text{Target Pendapatan APBD}}$$

k. Variabel Sebelas

$$V11 = \frac{\text{Realisasi belanja APBD}}{\text{Pagu belanja APBD}}$$

2. Menghitung perubahan rasio, yaitu rasio tahun t dikurangi tahun t-1 pada masing-masing variabel.

$$\text{Selisih Rasio} = \text{Rasio Tahun } t - \text{Tahun } t - 1$$

3. Mengelompokkan nilai perubahan rasio berdasarkan klaster daerah, dalam penelitian ini kabupaten dan kota di Jawa Tengah diasumsikan dalam satu klaster, serta membagi dalam kuartil.

Menurut Algifari (2010) kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 4 bagian yang sama besar.

PENILAIAN KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Rumus untuk mencari letak kuartil data tunggal dengan n ganjil:

$$Q1 = \frac{1(n+1)}{4}$$

$$Q2 = \frac{2(n+1)}{4}$$

$$Q3 = \frac{3(n+1)}{4}$$

4. Memberikan nilai 1-4 pada masing-masing kuartil berdasarkan polarisasi yang ditentukan untuk karakteristik variabel. Pemberian penilaian masing-masing variabel kemudian dikelompokkan menurut kuartil tertinggi hingga terendah. Penilaian ditetapkan berdasarkan hasil pengelompokan dengan memperhatikan polarisasi variabel variabel dalam penilaian, yang meliputi:

- a) Searah, yaitu makin besar selisih maka makin besar nilai yang diperoleh.

Dalam hal penilaian dengan polarisasi searah, maka berdasarkan kuartil yang ditetapkan penilaian sebagai berikut:

- 1) Untuk kuartil tertinggi mendapatkan skor 4 (empat).
- 2) Untuk kuartil menengah pertama mendapatkan skor 3 (tiga).
- 3) untuk kuartil menengah kedua mendapatkan skor 2 (dua).
- 4) untuk kuartil terendah mendapatkan skor 1 (satu).

- b) Berlawanan, yaitu makin besar selisih maka makin kecil nilai yang diperoleh.

Dalam hal penilaian dengan polarisasi berlawanan, maka berdasarkan kuartil yang ditetapkan penilaian sebagai berikut:

- 1) untuk kuartil tertinggi mendapatkan skor 1 (satu)
- 2) untuk kuartil menengah pertama mendapatkan skor 2 (dua)
- 3) untuk kuartil menengah kedua mendapatkan skor 3 (tiga)
- 4) untuk kuartil terendah mendapatkan skor 4 (empat).

5. Menjumlahkan nilai keseluruhan variabel menjadi nilai kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

5	Kota Surakarta	32
6	Kab. Sukoharjo	31
7	Kab. Magelang	30
8	Kab. Semarang	30
9	Kab. Grobogan	30
10	Kab. Wonogiri	29
11	Kab. Banjarnegara	29
12	Kab. Tegal	29
13	Kab. Kendal	29
14	Kab. Jepara	28
15	Kota Tegal	28
16	Kab. Purworejo	27
17	Kab. Sragen	27
18	Kab. Karanganyar	27
19	Kab. Boyolali	27
20	Kab. Brebes	26
21	Kab. Batang	26
22	Kota Magelang	26
23	Kab. Cilacap	25
24	Kab. Wonosobo	25
25	Kab. Blora	25
26	Kab. Banyumas	25
27	Kab. Kudus	24
28	Kab. Kebumen	24
29	Kab. Salatiga	24
30	Kab. Pekalongan	24
31	Kab. Pati	24
32	Kota Pekalongan	24
33	Kab. Demak	23
34	Kab. Rembang	23
35	Kab. Temanggung	19

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Terbaik Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan

No	Daerah	Nilai Terbaik
1	Kota Semarang	38
2	Kab. Klaten	33
3	Kab. Purbalingga	33
4	Kab. Pemalang	32

Tabel diatas enunjukkan tiga puluh lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, nilai terbaik diraih oleh Kota Semarang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Purbalingga. Kota Semarang memperoleh nilai terbaik pertama yaitu mendapatkan nilai akhir sebesar 38, walaupun Kota Semarang mendapatkan pendapatan yaitu sebesar Rp 3.964.562.762.679 tidak lebih besar dari Kabupaten Purworejo yang memiliki realisasi pendapatan paling tinggi yaitu sebesar Rp 4.229.615.584.308, tetapi Kota semarang memiliki defisit yang lebih kecil yaitu sebesar

PENILAIAN KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

(Rp 364.855.015.193) dibandingkan dengan Kabupaten purworejo yang memiliki defisit lebih besar yaitu (Rp 1.265.249.608.970). Kabupaten Klaten memperoleh nilai terbaik kedua yaitu mendapatkan nilai 33, walaupun Kabupaten Klaten memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp 2.580.619.677.724 lebih kecil dari Kabupaten Purworejo, tetapi Kabupaten Klaten memiliki surplus sedangkan Kabupaten Purworejo mendapatkan defisit. Sedangkan posisi ketiga diraih Kabupaten Purbalingga dengan mendapatkan nilai akhir yang sama dengan kabupaten Klaten yaitu sebesar 33, walaupun keduanya memiliki nilai akhir yang sama tetapi Kabupaten Klaten mempunyai komponen nilai yang lebih baik dari Kabupaten Purbalingga, nilai polarisasi 4 di Kabupaten Klaten lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga. Sementara posisi terakhir bukan Kota Salatiga yang memiliki realisasi pendapatan paling rendah akan tetapi di peroleh Kabupaten Temanggung yaitu dengan nilai akhir 19, Kabupaten Temanggung kesebelas variabelnya memiliki nilai polarisasi searah yang kecil dan nilai polarisasi berlawanan yang besar, sehingga mengakibatkan nilai akhir yang sangat kecil, dan mendapatkan peringkat yang paling buruk diantara kabupaten dan kota yang berada di Jawa Tengah.

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan bahwa nilai terbaik kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 266/PMK.07/2015 bahwa Kabupaten Semarang mendapatkan posisi pertama yaitu dengan nilai 38. Sementara posisi terakhir diperoleh pada Kabupaten Temanggung dengan nilai 19.

PENUTUPAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB IV maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/PMK.07/2015, dengan 11 variabel menunjukkan hasil :
 - a. Variabel satu dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/ kota
 - b. Variabel dua dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/ kota
 - c. Variabel tiga dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/ kota
 - d. Variabel empat dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/ kota
 - e. Variabel lima dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/ kota
 - f. Variabel enam dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/ kota

- g. Variabel tujuh dengan nilai terbaik sebanyak sembilan kabupaten/kota
 - h. Variabel delapan dengan nilai terbaik sebanyak sembilan kabupaten/kota
 - i. Variabel sembilan dengan nilai terbaik sebanyak sembilan kabupaten/kota
 - j. Variabel sepuluh dengan nilai terbaik sebanyak delapan kabupaten/kota
 - k. Variabel sebelas dengan nilai terbaik sebanyak sembilan kabupaten/ kota
2. Berdasarkan nilai terbaik kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/PMK.07/2015, dengan 11 variabel yaitu diraih oleh Kota Semarang dengan nilai akhir 38.

Saran

1. Untuk Kabupaten Temanggung yang memperoleh nilai terendah, diharapkan untuk periode selanjutnya dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik dan pembahasan yang sama diharapkan menambah periode penelitian, guna diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
3. Bagi peneltian selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan ketiga indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2010. *Statistika Plus: Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Salemba empat. Yogyakarta.
- _____, Lukman, B., dan Dedi, B., H. 2017. Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat. *Jurnal BPPK* 10(1): 2-3.
- Mutiha, A., H. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia* 4(2): 106.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2015

PENILAIAN KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

*Pemeringkatan Kesehatan fiskal dan
Pengelolaan Keuangan Daerah. 31
Desember 2015.*

Whenny, C., Dhia. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* 7(3): 2-3.

Albasiah, O., Agustina. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1(2).

Sari, R. 2014. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5(1): 79-97.